



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 Fex. 22070
PAINAN

MASA SIDANG : I
TAHUN SIDANG : 2020
RAPAT KE : 1
JENIS RAPAT : Rapat Dengar Pendapat

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT LINTAS KOMISI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat : Terbuka
Hari /Tanggal : Senin, 9 Maret 2020
Waktu : Pukul 11.²⁰ Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Pimpinan Rapat : **ERMIZEN, S. Pd**
Sekretaris Rapat : **JARIZAL, SE**

A c a r a : Rapat Dengar Pendapat/Hearing Lintas Komisi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Badan Pendapat Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pendapat Daerah.

I. Rapat di hadir

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Ermizen, S. Pd : Ketua
2. Jamalus Yatim : Wakil Ketua
3. Jarizal, SE : Sekretaris/bukan Anggota
4. Aprinal Tanjung, SH. Dt. Rj. Moleh : Anggota
5. Harianto, SH : Anggota
6. Al Ermon, SH : Anggota
7. Aljufri, SH, MH : Anggota
8. Feby Rifli, SH : Anggota
9. Irjal, SE : Anggota
10. Pardis, A. Md : Anggota
11. Yusman, S. Ag, MM : Anggota
12. Marzan : Anggota
13. Darwiadi, SH : Anggota
14. Kusmanto, S.IP : Anggota
15. Hanafi Herman, S. Pt : Anggota
16. Robi Binur : Anggota
17. Drs. Daskom, M. Pd : Anggota
18. Fetmadarni, SAP : Anggota
19. Ronaldi, A. Md : Anggota
20. Mahmud Yosrizal : Anggota
21. Aprizal, SH : Anggota
22. Julianavia, SH, M.Si : Anggota
23. Drs. Erman Sawar : Anggota

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 24. Armadi, SE | : Anggota |
| 25. Alkisman Nurman, SIP | : Anggota |
| 26. Hardianto | : Anggota |
| 27. Irwan, A. Md | : Anggota |

II. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dasrianto Putra, S. Sos, M. Si | : Ka. Badan Pendapatan Daerah |
| 2. Joko Setiabudi | : Kabid. Monev |
| 3. Vorzil, S.SSTP | : Kabid. Pendapatan |
| 4. Rismana Adhika | : Kasi Pendapatan |
| 5. Jeni Sherly | : Pendapatan |

III. Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mulyadi M., AP, M.Si | : Kabag Persidangan dan Risalah |
| 2. Ikhsan Busra, SH | : Kabag Hukum dan PerUndang-Undangan |
| 3. Pris Derika Habdi, SH | : Kabag Umum |
| 4. Rahmi Hayati, SH | : Kabag Keuangan |
| 5. Syahril, SH | : Kasubag Hukum |
| 6. Edmon Dantes, SE, MM | : Kasubag Persidangan |
| 7. Abadi Jaya S.SosI., M.Si | : Kasubag Risalah. |
| 8. Gusriyendi, SH | : Kasubag Perencanaan Anggaran |
| 9. Rafesria A. Saibi, SH | : Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 10. Alvina Oriza, S. Kom, M.Si | : Kasubag Dokumentasi Hukum |
| 11. Daswandi, A. Md | : Kasubag Humas dan Protokoler |
| 12. Rusmadi K., SH, MH | : Staf |
| 13. Surianti | : Staf |
| 14. Yulidar | : Staf |

IV. Jalannya Rapat

Pimpinan Rapat (Ermizen, S. Pd)

Penghormatan pimpinan kepada hadirin yang hadir.

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT, dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. pesan Pimpinan sebagai berikut :

- ✓ Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Pimpinan membuka rapat Jam 11.²⁰ Wib dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
- ✓ Selanjutnya dipersilahkan pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyampaikan exsposenya.

Dasrianto Putra, S. Sos, M.Si (Ka. Badan Pendapatan)

- ✓ Untuk pendapatan Desember 2019 sistem pajak sudah online untuk pengembangan pola kerja sama kita sudah komit dengan Bank Nagari E-Kir. Penerimaan PAD sesuai hasil pemeriksaan BPK RI dari tahun ketahun pada Tahun 2017 Rp. 109.834.834.346.- tahun 2018 Rp. 123.906.524.443.- dan Tahun 2019 sebanyak Rp. 135.032.868.843.- angka ini masih dapat dioptimalkan lagi sebagai pendapatan asli daerah.
- ✓ Pajak bagi hasil dapat dioptimalkan pada tahun depan cuman tinggal regulasi dari Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati.
- ✓ Untuk peningkatan PAD Badan Pendapatan tahun 2020 ini sedang pendataan NJOP yang jauh bedanya dengan PBBP2.
- ✓ Laporan pajak by name by adres yang diminta oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan kami sudah serahkan ke Pendamping Komisi II dan tidak sampai ke anggota Komisi II kami juga harap ini menjadi perhatian di Sekretariat DPRD kenapa dokumen yang kami serahkan tidak sampai ke komisi II.

Aljufri, SH, MH

- ✓ Kami dari komisi II belum melaksanakan hearing dengan dinas pendapatan daerah, dan yang kami minta ini baru kami terima, idealnya sebelum rapat ini kami mesti hearing dulu untuk membaca dokumen yang ada ini, dengan ada dokumen ini menjadi tolak ukur mana saja yang telah digarap mana yang belum sehingga ada penambahan dan peningkatan PAD di wilayah Pesisir Selatan contoh masalah pajak air bawah tanah karena tidak mungkin perusahaan itu tidak pakai air bawah tanah, genset dan pajak memakai alat berat tentu ada pajaknya maka ini perlu kita lihat dan ditinjau kelapangan peningkatan PAD kedepannya.
- ✓ Galian C yang digarap dari Lunang ke Selaut dan alat yang dipakai dan untuk data ini masih global dan itu kalau kita bicara perusahaan saja baru bagaimana yang lainnya. Kalau dibiarkan berapa kerugian negara setiap tahunnya dan PAD pesisir Selatan tidak akan pernah naik dari tahun ketahun.

Julianavia, SH, M.Si

- ✓ Bahan yang diserahkan oleh Badan Pendapatan kami belum menerima sampai saat ini, dari sisi target PAD dari tahun ketahun memang meningkat tetapi ada beberapa target PAD yang menurun agar ini dijelaskan oleh Kepala Badan Pendapatan.

Dasrianto Putra, S. Sos, M.Si (Ka. Badan Pendapatan)

- ✓ Untuk dokumen kami sudah serahkan dan idealnya hearing ini memang internal di komisi II, untuk penerimaan PAD kita harus dapat menggali terhadap potensi daerah. Untuk tahun 2019 sudah final sesuai Peraturan Bupati yang disusun dan untuk air bawah tanah kita masih menunggu Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- ✓ Untuk air bawah tanah kami sudah data tentang air bawah tanah memang semua perusahaan memakai air bawah tanah tetapi kita sedang koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan akan menjadi tambahan pajak pada tahun 2021.
- ✓ Pajak penerangan akan menjadi target baru pada 2021 seperti PT. Dempo di Tambang, tahun 2019 ada sekitar 1.1 milyar dari pajak penerangan dari PLN setiap bulannya.
- ✓ Pemakaian air bawah tanah itu adalah kebijakan daerah dan setelah disurvei ke lapangan seluruh hotel dan tempat cucian kendaraan memang memakai air bawah tanah.

Aljufri, SH, MH

- ✓ Apakah sudah ada daerah yang melakukan pungutan pajak air bawah tanah termasuk tentang pajak cangkang dan alat-alat berat.

Dasrianto Putra, S. Sos, M.Si (Ka. Badan Pendapatan)

- ✓ Pajak air bawah tanah yang pungut untuk Provinsi Sumatera Barat baru di Kota Padang dan untuk pajak cangkang dan alat berat itu tergantung pada pajak pabrik. Pajak air tanah kami akan lakukan komunikasi yang persuasif dengan perusahaan yang pakai air bawah tanah.
- ✓ Pajak bagi hasil berkenaan dengan pendapatan daerah dikelola oleh Badan Pendapatan kalau PAD itu berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKD.

Aljufri, SH, MH

- ✓ Pajak bagi hasil baru akan dimulai untuk menggali potensi pendapatan atau pajak, kita perlu informasi dari daerah lain untuk menggali PAD yang ada di Pesisir Selatan termasuk pengelolaan CSR dari perusahaan yang angka sesuai aturan berkisar 3 % perusahaan itu berada. Dan untuk CSR ini kami juga belum mendapatkan gambaran yang sebenarnya.

Dasrianto Putra, S. Sos, M.Si (Ka. Badan Pendapatan)

- ✓ Badan Pendapatan kami sudah lakukan koordinasi dengan BPKD dan saya kira perlu diagendakan rapat dengan tiga OPD ini sehingga jelas mana yang dipungut BPKD, Badan Pendapatan dan SKPD teknis sehingga data yang diminta dapat dilengkapi.

- ✓ PT. Dempo termasuk potensi baru untuk pendapatan asli daerah dan akan dilakukan MOU dengan PLN Sumatera Barat. Pajak alat berat akan disinkronkan dengan pajak dari provinsi dan daerah menunggu dari provinsi.
- ✓ Berdasarkan surat Bupati ke Perusahaan atau pabrik proyek pembangunan berkenaan dengan materil perusahaan sepakat untuk melakukan pemungutan langsung terhadap Galian C.
- ✓ PT. Kemilau sudah mengeluarkan pajak galian c termasuk yang dijual ke perusahaan grup PT. Incasi Raya.
- ✓ Pajak kuari sebanyak 2,7 milyar tahun 2019 atau berkisar 126 % yang ditargetkan.
- ✓ Peningkatan dan pencapaian PAD saya kira DPRD perlu hearing dengan SKPD teknis sehingga jelas seperti kondisi pajak dan retribusi di setiap SKPD yang ada. Untuk tahun 2019 akan kita lakukan e-kir untuk mengurangi kebocoran yang terjadi.

Julianavia, SH, M.Si

- ✓ Galian C yang dikelola oleh PT. Diki Karya termasuk PT. Atos di Tambang bagaimana MOUnya dengan pajak daerah.

Dasrianto Putra, S. Sos, M.Si (Ka. Badan Pendapatan)

- ✓ Pola kerja sama kuari yang ada di Tambang pajak di potong oleh PT. Nur Bersaudara dan PT. Atos sampai saat ini belum ada laporan dan kami akan tinjau kelapangan kalau memang ia akan menjadi potensi baru tahun berikutnya.

Pimpinan Rapat (Jamalus Yatim)

- ✓ Melihat tanggapan tidak sinkron dan data sudah satu bulan diserahkan ke oleh Badan Pendapatan sudah serahkan 1 bulan yang lalu ke Sekretariat DPRD tetapi bahan tidak disampaikan ke komisi II sehingga rapat ini tidak nyambung seperti yang diharapkan yang idealnya hearing ini cukup dengan komisi II setelah itu jika ada pengembangan dan seluruh anggota DPRD harus mengetahui baru bawa kelintas komisi.

Aljufri, SH, MH

- ✓ Harapan kami untuk yang akan datang komisi melalui mitra kerjanya masalah pajak harus transparan dari sisi pengelolaan pajak kapan perlu disampaikan pada rapat paripurna. Sehingga Badan Pendapatan dapat gambaran tentang pengelolaan pajak pada setiap SKPD teknis yang ada di Pemerintah Daerah.

Pardis, A. Md

- ✓ Untuk penerimaan daerah dari pajak daerah tentu ada regulasi dari pemerintah, dan saya minta analisa target pendapatan pada SKPD teknis agar melalui analisis yang matang dan rasional seperti dinas perhubungan target PAD 3 milyar realisasi 50 % kan tidak baik jika dilihat dari sisi kinerja SKPD.
- ✓ Klinik swasta seperti rumah sakit BKM, klinik dan budi daya udang apakah ini bisa dikenakan penerimaan pajak daerah, termasuk parkir di rumah sakit BKM dan pajak burung walet termasuk pengaturan bunyian suara walet seperti apa mohon penjelasannya.

Dasrianto Putra, S. Sos, M.Si (Ka. Badan Pendapatan)

- ✓ Dinas perhubungan ada 3 pendapatan atau pajak adalah Kir, parkir dan pajak parkir ditepi jalan. Taman parkir yang ada di depan M. Zein Painan akan dikelola langsung oleh dinas perhubungan masalah sekarang Pemerintah Daerah tidak punya kantong parkir yang baru di parkir. Dr. M. Zein Painan dan carocok Painan. Kedepan jika e-kir sukses maka kedepan kita akan lakukan e-tiket untuk masuk wisata dan e-parkir.
- ✓ Untuk tambak udang bukan masuk pajak dan retribusi daerah sehingga daerah penonton dan cuman pajak PPH, untuk rumah sakit swasta dan klinik dengan dinas kesehatan sudah koordinas juga tidak ada potensi retribusi yang kita pungut cuman bisa lakukan jasa retribusi kebersihan dan itu sudah jalan beberapa tahun yang lalu dengan perda yang ada.

- ✓ Parkir di rumah sakit BKM karena pribadi maka itu dikelola oleh BKM sendiri, untuk pajak walet terhadap perpup yang disusun menyangkut retribusi harga satuan sarang burung walet dan menghindari cukong oleh penjualan sarang burung walet sehingga masyarakat kita yang susah membangun sarang walet tetapi mereka dirugikan.

Pimpinan Rapat (Jamalus Yatim)

- ✓ Pengaturan parkir kalau di Bogor dengan sistem lelang dan rapat untuk Badan Pendapatan dicukupkan dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Dan rapat skor Jam 13.¹⁰ Wib dengan ketukan palu 1 (satu) kali.

Pimpinan Rapat (Ermizeb, S. Pd)

- ✓ Pimpinan membuka rapat Jam 14.⁴⁵ Wib dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Selanjutnya masuk dengan BPKD *dengan ketukan palu 1 (satu) kali*.

Pardis, A. Md

- ✓ Minta pada Ka. BPKD untuk dapat menyampaikan penjabaran APBD Tahun 2020 dan berapa kemampuan keuangan daerah pada tahun ini.

Kusmanto, S.IP

- ✓ Untuk ketinggalan pikir tahun 2019 dan tahun 2020 apakah bisa direalisasikan seperti dana hibah. Dan pikir tahun 2020 bagaimana informasinya.

Aljufri, SH, MH

- ✓ Pajak perusahaan perkebunan yang ada di Pesisir Selatan berapa jumlahnya apakah ada jumlah dan yang diproduksi apa, Dan berapa persentase yang dibagikan ke daerah. Seperti PT. Incasi Raya dan lainnya.
- ✓ Pengelolaan CSR kepada daerah atau masyarakat dan apakah ada regulasi daerah yang mengatur tentang CSR, karena kami miris melihat dilapangan jika dibandingkan dengan perusahaan ditempat lain. Kalau tidak ada kontribusi terhadap daerah kenapa perusahaan itu ada di Pesisir Selatan. Kalau itu jelas kami akan cross cek kelapangan sehingga semua menjadi jelas. Jangan-jangan uang diterima tetapi informasi tidak sampai ke DPRD.
- ✓ Agar dijelaskan terhadap perusahaan yang boleh daerah melakukan pungutan pajak dan retribusi karena daerah kita digarap termasuk CSR tetapi feedback tidak ada didaerah lain sampai ke Amerika disekolahkan anak masyarakat dengan CSR perusahaan.

Suhandri, SE, MM (Ka. BPKD)

- ✓ Penjabaran APBD tahun 2020 totalnya 1.7 triliun belanja tidak langsung 1.4 Triliun belanja langsung 805 milyar. KKD berada pada posisi menengah yang terdiri pendapatan yang mempedomani realisasi dua tahun sebelumnya.
- ✓ Untuk pikir anggota DPRD nanti kita print, perkebunan tidak masuk pada potensi kita hannya PPH, untuk perusahaan sesuai aturan NPWP wilayah di Padang bukan di daerah kita karena memang wilayah provinsi.
- ✓ Jika Pemerintah Daerah melakukan pungutan diluar aturan maka Kepala daerah dapat di PTUNkan. Sesuai aturan yang ada Daerah tidak ada menerima pajak dan retribusi dari perusahaan untuk CSR langsung pada masyarakat.
- ✓ Pemerintah Daerah untuk pajak kendaraan sudah optimal, tetapi untuk data valit kami tidak punya data itu.

Kusmanto, S. IP

- ✓ Bamus rapat kemarin agak sulit mengagendakan karena Ranperda sampai sekarang belum masuk untuk itu anggaran untuk pansus apakah dapat dialihkan ke kegiatan lain. Sehingga anggaran ranperda itu nantinya dapat dipergunakan.

Suhandri, SE, MM (Ka. BPKD)

- ✓ Pengalihan belanja dapat dilaksanakan jika berada pada kegiatan yang sama, namun demikian untuk masalah itu minggu depan akan ada rapat dengan TAPD tentang percepatan realisasi APBD dan nanti akan kita sampaikan.

Kesimpulan Rapat :

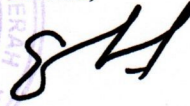
- ✓ Agar masing-masing komisi dapat menegaskan pada SKPD terkait atau mitra kerja untuk dapat memaksimalkan setiap potensi PAD.
- ✓ Komisi II dapat menindaklanjuti rapat dengar pendapat terhadap pendapatan dengan SKPD terkait.

Ucapan maaf pimpinan rapat jika ada kekeliruan selama memimpin rapat.

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*" Pimpinan Rapat tutup rapat Jam 15.¹⁰ WIB. dengan ketukan palu 3 X kali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



ERMIZEN, S. Pd

